

PENGARUH BANTUAN SOSIAL BPNT DAN PKH TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Khotim Fadhl¹⁾, Laila Rohmatun Nazila²⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

²Fakultas Ekonomi, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

¹khotim@unwaha.ac.id

²lailarohmatunnazila@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 12 Desember 2022

Revisi, 2 Januari 2023

Diterima, 20 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

BPNT

PKH

Penanggulangan Kemiskinan..

ABSTRAK

Bantuan sosial merupakan salah satu strategi pemerintah yang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di kabupaten Jombang tepatnya di desa pucangsimo dalam kaitannya mengenai pendistribusian bantuan pangan non tunai atau BPNT dan bansos yang dikemas dalam bentuk jaminan sosial yaitu PKH atau program keluarga harapan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi berganda yang menggunakan aplikasi *software* SPSS versi 26 serta uji hipotesisnya berupa uji t parsial dan uji f simultan. Untuk variabel bebasnya adalah BPNT (X1) dan PKH (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah penanggulangan kemiskinan (Y). dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa BPNT memiliki pengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan dan PKH memiliki pengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian secara simultan BPNT dan PKH secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Diketahui bahwa nilai koefisien 0,533 yang artinya pengaruh penanggulangan kemiskinan sebesar 53,3% dijelaskan oleh BPNT dan PKH, sedangkan pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan lainnya sebesar 46,7% dijelaskan faktor lain.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Laila Rohmatun Nazila

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email : lailarohmatunnazila@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sejak tersebarnya varian virus yang melanda berbagai belahan bumi di dunia menjadikan virus tersebut dapat dikatakan sebagai virus yang mematikan. Dikutip pada detik.com bahwa kasus covid di dunia yang terjadi sejak penyebaran 2020 sampai 2022 tercatat sekitar 231.394.042 kasus. Walaupun demikian pada tahun 2022 kasus covid ini mulai menurun karena himbuan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tertib memakai masker, kemudian melakukan vaksin maksimal tiga kali. Kebijakan pemerintah tidak berhenti pada himbuan untuk tetap bermasker dan melakukan vaksinasi melainkan terdapat kebijakan yang lain selain ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Meskipun pada penerapan kebijakan terdapat pro kontra yang memang selalu mewarnai

kebijakan di Indonesia pro kontra tersebut juga turut menjadi ajang penggiringan opini publik yang menjurus pada pemahaman masyarakat kearah negatif. Seperti himbuan pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi karena vaksinasi merupakan syarat seseorang dapat melakukan perjalanan keluar kota maupun luar daerah. Himbuan yang diterima memiliki berbagai sambutan yang berbeda ada yang enggan melakukan vaksin karena pada antibiotik vaksin terdapat minyak babi, kemudian vaksin yang telah disuntikkan dapat membuat gejala demam, hingga meninggal dan masih banyak kaitannya mengenai vaksin yang dinilai negatif dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Beranjak dari pro kontra dalam dua tahun pandemi covid-19 berlangsung, kini baik masyarakat maupun pemerintah sudah seharusnya bahu membahu

untuk menuju *new normal* karena seiring berjalannya waktu kasus positif juga semakin menurun. Dilihat sejak kasus pandemi awal yang masuk Indonesia kemudian melonjak drastis, pemerintah yang bergerak dibidang kementerian sosial, kementerian keuangan, kementerian kesehatan dll juga saling bahu membahu pada masalah kesejahteraan masyarakat. Kementerian keuangan mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19 diantaranya mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM hingga APBN. Dengan besaran yang sangat banyak tersebut diharapkan masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakan anggaran dengan tepat.

Namun, tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut namun disisi lain penerima bantuan harus memiliki beberapa syarat. Pada penerima bantuan sosial, penerima manfaat merupakan mereka yang benar-benar tergolong dari masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan kelompok maupun individu yang memiliki ketidakmampuan mencukupi segala aspek kebutuhan dari makan, pakaian, kesehatan hingga pendidikan (Wijaya, 2010).

Dijelaskan bahwasannya masyarakat miskin merupakan keluarga dengan serba kekurangan dalam segi apapun. Pemerintah dengan sigap berusaha menanggulangi kemiskinan dengan memberi kebijakan. Kemiskinan tidak terjadi begitu saja melainkan bisa dilihat dari beberapa aspek, misalnya ketidakmampuan dalam memenuhi pendapatan sehingga akan mengakibatkan kurangnya pemenuhan dasar dalam keluarga. Kemudian adapula yang disebabkan adanya ketimpangan di wilayah tempat tinggal, kebiasaan tidak produktif hingga disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah.

Diketahui kemiskinan di Jawa Timur sejak 2018-2021 telah mencapai angka ribuan sejak tahun 2018 sampai 2021, berikut grafik kemiskinan di Jawa Timur:



Sumber BPS, diolah 2022

Dari kenaikan dan penurunan jumlah kemiskinan diatas diketahui tahun 2018 kemiskinan telah mencapai 120.000, kemudian menurun pada tahun 2019 sebanyak 116.000 dan meningkat drastis mencapai 194.000 di taun 2020 dan turun dengan selisih 67.000 dari tahun 2020 ke 2021. Dari grafik kemiskinan tersebut kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor.

Kemiskinan yang muncul seperti yang telah dijelaskan diatas tidak lepas dari peran pemerintah dalam rencana kerjanya dalam penanggulangan kemiskinan atau upaya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan perpres yang tercantum pada nomor 15 tahun 2015 terkait percepatan penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga klaster, diantaranya:

1. Pada klaster pertama disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan dengan penyaluran bantuan sosial bernasis keluarga seperti jamkesmas, PKH, RASKIN hingga bantuan bagi siswa miskin atau BSM.
2. Selanjutnya untuk klaster dua dikelompokkan dalam program pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga dan sekitar.
3. Sedangkan untuk klaster ketiga terdapat pemberdayaan masyarakat namun dikhususkan untuk usaha mikro kecil yang merupakan bagian dari kredit usaha rakyat atau KUR. (Aditya Nugraha, 2011).

Perluasan bantuan sosial tersebut yang terus bergulir sampai saat ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Menelusur keefektifan bantuan BPNT dan PKH pada strategi penanggulangan kemiskinan pada media informasi Kompas 9 Mei 2018, dimana PKH dinyatakan dapat menurunkan stunting secara signifikan, pernyataan yang dapat dilihat dari hasil riset yang dipaparkan melalui konferensi "*Evidence of Stunting From Three Randomized Evaluation in Indonesia*". Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helvin Gultom (Kabupaten & Tenggara, 2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dari adanya kedua bantuan yang berupa BPNT dan PKH. Kedua variabel bebas tersebut diharapkan pemerintah dapat memecahkan dan mengurangi masalah kemiskinan pada penerima manfaat. (Kabupaten & Tenggara, 2020).

Dikutip dari laman TNP2K atau tim nasional penanggulangan kemiskinan menyatakan bahwa BPNT adalah bentuk reformasi dari bansos RASTRA dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat masalah. Salah satu permasalahannya terletak pada indikator tepat sasaran yaitu terjadi ketidaktepatan penerima, yang mana penerima merupakan masyarakat yang mampu. Kemudian indikator tepat jumlah tidak sesuai. Bantuan pangan non tunai yang disalurkan diantaranya adalah beras, telur dan daging, dengan disalurkan ketiga bahan pangan pokok tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran KPM selama satu bulan tergantung banyaknya anggota keluarga KPM.

Yang kedua bantuan sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah program keluarga harapan atau bantuan sosial yang berbentuk uang tunai yang disalurkan kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan hingga kebutuhan

lansia dan disabilitas. Dengan hadirnya kedua bantuan tersebut beserta bantuan lainnya juga tidak bisa dianggap tidak bermanfaat karena pasalnya program yang dirancang tidak untuk mencabut akar kemiskinan melainkan mengurangi kerentanan, kesengsaraan serta menanggulangi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan apakah program bantuan BPNT dengan PKH dapat efektivitas berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif yang berkaitan dengan angka dan analisis rumusan masalah dengan tujuan untuk menggali apakah variabel bebas penelitian berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengujiannya melalui SPSS versi 26.

Populasi atau kelompok kecil yang akan diteliti adalah KPM atau keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH desa Pucangsimo dengan mengambil sampel menggunakan signifikansi 10% dan didapatlah 74 responden dari 290. Untuk menentukan sampel digunakan teknik *random sampling* atau penentuan sampel tanpa memperhatikan starta.

Untuk mendapatkan data yang nantinya akan diolah pada SPSS versi 26 maka ada kaitannya mengumpulkan data dengan cara menyebar angket yang kemudian akan ditabulasikan dan di uji validitas dan reliabilitas sebelum uji asumsi klasik, regresi berganda hingga uji hipotesis. Penyebaran angket dilakukan menggunakan skala likert dimana menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa skala tersebut dapat mengukur sikap, pendapatan hingga persepsi mengenai fenomena sosial kuisioner peneliti dapat memperoleh data yang efisien. Kembali pada pengujian validitas dan reliabilitas tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan sudah valid serta konsisten dalam kurun waktu ke waktu.

Setelah melakukan kedua uji tersebut uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji asumsi klasik, regresi berganda dan yang terpenting adalah uji hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini nantinya akan diperoleh jawaban dari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang artinya akan ada pengaruh atau tidak pada salah satu variabel maupun keduanya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

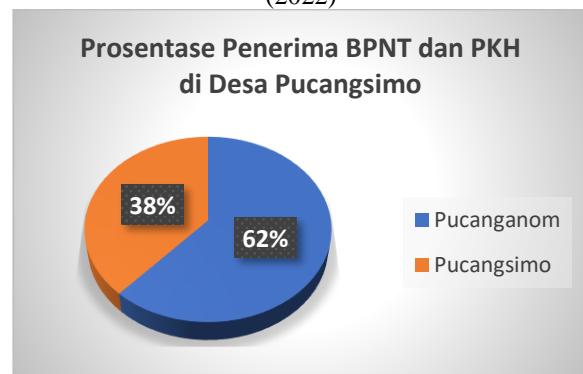
Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah administratif Jawa Timur yang letaknya sangat strategis, dimana termasuk perlintasan jalur Surabaya-Madiun-Yogyakarta. Kabupaten Jombang memiliki kawasan yang memiliki topologi yang berbeda beda diantaranya di kawasan utara termasuk bagian pegunungan kapur yang bentuk fisiknya mendatar dan berbukit, kawasan tengah Jombang termasuk kawasan yang tepat ditanami tumbuhan padi

sedangkan bagian selatan tepatnya di bagian tenggara cocok dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Dari masing masing topologi atau kemiringan tanah tersebut Jombang merupakan daerah yang mampu menghasilkan padi, bebatuan kapur, hingga hasil perkebunan. Berdasarkan banyaknya kecamatan dan desa, Jombang memiliki 21 kecamatan, 302 desa dengan 1258 dusun. Pada penelitian yang dilakukan di Jombang dengan bertepatan di kecamatan Bandarkedungmulyo, Desa Pucangsimo. Dengan wilayah desa yang pastinya cukup luas tersebut, peneliti dibantu pendamping PKH, TKSK atau tenaga kesejahteraan sosial yang tugas dasarnya adalah mengumpulkan data keluarga penerima manfaat atau KPM untuk kebutuhan DTKS. Walaupun kedua petugas yang memiliki peran penting terhadap tersalurkannya bantuan ke KPM, petugas tersebut juga memiliki anggota KPM yang peran pentingnya agar bantuan dapat disalurkan ke setiap KPM di desa Pucangsimo. Petugas yang membantu yang dimaksudkan adalah ibu-ibu puskesmas atau perwakilan KPM dari setiap RW.

Jika dilihat 290 KPM tersebut menyebar pada dua dusun, diantaranya:

Nama Dusun	Jumlah Penerima
Pucanganom	179
Simo	111

Sumber: Data TKSK Bandarkedungmulyo, diolah (2022)



Gambar Prosentase penerima BPNT dan PKH
Sumber: Data TKSK Bandarkedungmulyo, diolah (2022)

Untuk mengambil sampel dari populasi tersebut, peneliti menggunakan signifikansi 10 % dengan perolehan sampel yang dijadikan responden sebanyak 74 dari 290 KPM.

Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan usia responden yang paling dominan adalah usia 41-60 tahun dengan latar belakang dominan IRT dan berpendidikan paling rendah adalah SD. Penerima manfaat yang diambil untuk menjawab kuisioner tersebut telah merespon pengaruh hadirnya bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan dengan kriteria baik sekitar 67 responden untuk BPNT, kriteria baik untuk variabel PKH sebanyak 47 responden dan 64 responden untuk variabel penanggulangan kemiskinan. Dari hasil jawaban responden yang diambil dengan cara menyebarkan angket atau kuisioner menggunakan

skala likert tersebut maka peneliti dapat mengelompokkan data yang kemudian diolah ke *software* SPSS 26 melalui serangkain uji.

Uji yang pertama dilakukan adalah uji validitas dan reliabilitas, pada uji tersebut koefisien r tabel yang digunakan adalah 0,336. Dari perbandingan r tabel dan r hitung ditemukan adanya pernyataan yang tidak valid sebanyak 4 butir dari 42 pernyataan. Sedangkan pada uji instrumen reliabilitas dengan koefisien alpha 0,600 menunjukkan adanya hubungan yang reliabel.

Setelah pengujian instrumen langkah selanjutnya adalah menentukan analisis regresi berganda. Dari hasil persamaan yang diperoleh dimana $Y = 29,676 - 0,172 X_1 + 0,701 X_2$. Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan (Y) bernilai 29,676 koefisien beta pada X_1 atau BPNT -0,172 dan variabel X_2 atau PKH sebesar 0,701.

Tabel uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	29.676	5.979		4.963	.000
BPNT	-.172	.090	-.155	-1.902	.061
PKH	.701	.078	.729	8.940	.000

a. Dependent Variable: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Data diolah (2022)

Selanjutnya untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidaknya sebuah penelitian ini, maka uji yang harus ditempuh adalah uji hipotesis yang dapat ditarik kesimpulan dari uji t diatas diperoleh variabel BPNT memiliki pengaruh negatif sebesar -1,902 dan PKH memiliki pengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 8,940.

Tabel uji f
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1693.452	2	846.726	40.441	.000 ^b
Residual	1486.548	71	20.937		
Total	3180.000	73			

a. Dependent Variable: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
b. Predictors: (Constant), PKH, BPNT

Sumber: Data diolah (2022)

Selain ada uji t pada pengujian hipotesis, terdapat uji f atau uji yang menunjukkan hubungan secara bersama dua atau lebih variabel X terhadap variabel Y. pada hasil uji f diatas menunjukkan $40,441 >$ dari f tabel 2,38 dan $sig\ 0,00 < 0,1$. Jadi secara bersamaan terdapat pengaruh yang signifikan antara BPNT dan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan.

Diambil dari hasil pengujian normalitas penelitian ini diperoleh gambar PP Plot yang bergerak mengikuti garis diagonal yang artinya penelitian menunjukkan pola distribusi normal.

Hasil yang perlu diketahui selanjutnya ada uji multikolinieritas yang memiliki nilai VIF yang tidak lebih dari 5 dimana hasil menunjukkan 1,011 maka

pada penelitian tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas dimana pada penelitian tidak ada titik titik yang membentuk pola tetapi menyebar. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pada penelitian juga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Nilai koefisien dari $R^2 = 0,533$ yang artinya pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan dinyatakan sebesar 53,3% oleh BPNT dan PKH, sedangkan pengaruh penanggulangan kemiskinan lainnya sebesar 56,7% dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Ditengahnya maraknya kebijakan publik yang gencar mengatasi masalah penyebaran covid-19 selama kurun waktu dua tahun lalu membuat masyarakat baik dari golongan atas maupun golongan bawah merasakan dampaknya. Dampak lain yang begitu dirasakan adalah mereka tidak bisa melakukan kegiatan di aktivitas luar ruangan seperti biasanya. Namun, hal tersebut tidak begitu dirasakan oleh kalangan atas, karena secara kecukupan kebutuhan pangan pendapatan mereka lebih dari cukup untuk memnuhi asupan sehari-hari. Sedangkan untuk golongan menengah ke bawah kebijakan tersebut begitu mencekik karena selain kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan seperti biasanya.

Sebuah kebijakan diciptakan bukan hanya mempertimbangkan satu hal melainkan diperlukan pertimbangan dari segala sisi dan pastinya menggunakan musyawarah agar kebijakan nantinya dapat menguntungkan semua golongan maupun lapisan masyarakat. Diketahui dari kebijakan dalam mengeluarkan anggaran misalnya, pemerintah tidak hanya menyalurkan anggaran untuk kalangan yang atas saja melainkan kalangan dari bawah juga diperhatikan. Seperti anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan UMKM yang berdampak, hal itu juga dilihat dari peran pelaku UMKM yang andil dalam wajib pajak. Kemudian anggaran untuk bantuan sosial yang memang tidak kalah penting karena dalam kondisi pandemi dua tahun kemarin memang telah merugikan banyak orang. Bantuan yang memang sebelumnya telah ada seperti BLT atau Bantuan Langsung Tunai, PKH, BPNT serta bantuan baru dan ramai dibicarakan beberapa waktu lalu yaitu BLT BBM.

Penelitian kali ini akan membahas bantuan yang sudah berjalan sebelum adanya pandemi sampai saat ini yaitu BPNT dan PKH, kedua bantuan yang disalurkan secara bersama guna meringankan beban masyarakat miskin ini juga perlu adanya perhatian. Meskipun sebenarnya bantuan sosial bukanlah solusi yang dapat mencabut akar kemiskinan di Indonesia, namun bantuan dapat menekan pengeluaran berlebihan keluarga penerima manfaat dan mengalihkan pendapatan yang didapatkan untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya.

Hadirnya bantuan yang disalurkan, terdapat pula sebuah persyaratan bagi rumah tangga, adapun persyaratan ditetapkan oleh keputusan kemensos RI

nomor 146/HUK/2013, kriteria yang termasuk diantaranya:

1. Upah dari pekerjaan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar
2. Pengeluaran yang habis untuk makan
3. Kesulitan dalam melakukan pengobatan di fasilitas umum
4. Tidak sanggup membeli pakaian setiap satu tahun sekali
5. Tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat menengah atas
6. Memiliki kondisi dinding rumah yang buruk
7. Kondisi lantai rumah yang masih tanah maupun, plester yang kurang baik
8. Atap rumah termasuk rumbia atau genteng, seng maupun asbes
9. Penerangan bukan merupakan listrik
10. Tempat tinggal luasnya kurang dari 8 meter persegi
11. Memiliki mata air yang tidak terlindungi.

Dari beberapa syarat yang dipaparkan diatas, sebuah rumah tangga juga harus benar-benar dari keluarga yang membutuhkan, karena bantuan yang dirancang agar masyarakat kurang mampu diharapkan dapat berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan (Lestari & Talkah, 2020).

Ditemukan dari hasil penelitian mengenai PKH bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. PKH itu sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dikemas dalam bentuk jaminan sosial yang disalurkan untuk mengurangi masalah kerentanan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, PKH adalah sebuah strategi pemerintah yang ditujukan untuk mencapai penanggulangan kemiskinan antargenerasi. Sebagai bantuan bersyarat untuk komponen ibu hamil, balita, anak usia sekolah hingga lansia dan disabilitas agar dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan untuk mempertahankan kesejahteraan masing-masing keluarga. Berdasarkan tujuan yang dikemukakan Aprilianto (2013) PKH memiliki tujuan:

1. Mengubah keadaan sosial maupun ekonomi KPM.
2. Memperbaiki latar belakang pendidikan anak usia sekolah dalam keluarga.
3. Memperbaiki kesehatan pada ibu dan anak balita dalam keluarga penerima manfaat.
4. Memperbaiki kualitas akses pendidikan dan kesehatan.

Rumah tangga sangat miskin atau RTSM yang dimaksud dalam bantuan ini adalah mereka yang sudah tergolong dalam kategori penerima PKH dan sudah termasuk kategori keluarga fakir miskin dan pastinya juga termasuk rumah tangga tidak mampu.

Selain itu disalurkan bantuan PKH juga tidak semata-mata diberikan namun, pada setiap bulannya setiap KPM harus menghadiri pendampingan untuk memenuhi kewajibannya agar menciptakan perubahan perilaku KPM dalam memanfaatkan program bantuan PKH. Dalam setiap pertemuan peningkatan kemampuan keluarga

diperlukan edukasi berkelanjutan terkait pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, hingga perlindungan anak dan pengasuhan lansia dan disabilitas.

Selama disalurkan bantuan PKH terdapat sebuah pertemuan yang bertujuan meningkatkan keluarga atau disebut P2K2, kegiatannya meliputi intervensi perubahan perilaku KPM agar lebih mandiri. Oleh sebab itu selain PKH ditujukan menyalurkan bantuan kepada KPM namun, sejak penyaluran bulan pertama bantuan setiap KPM diwajibkan mengikuti pertemuan tersebut.

Sedangkan untuk bantuan BPNT dari hasil penelitian di lapangan bahwasanya bantuan BPNT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Dilihat dari segi fungsinya bantuan pangan ini hanya sekedar menekan pengeluaran berlebih KPM terdapat konsumsinya untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Disalurkan bantuan BPNT yang dulunya merupakan bantuan RASTRA yang didalamnya perlu adanya transformasi mengubah pola subsidi menjadi pola penyaluran tanpa uang tunai berguna mendorong perilaku produktif KPM sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas bantuan artinya penyaluran yang berprinsip dapat menjadi tolak ukur dalam membentuk kepercayaan publik masyarakat dengan alokasi dana, anggaran dan sebagainya (Hermawan et al., 2021). Dengan begitu penerima manfaat dapat mengetahui pembayaran yang dilakukan secara non tunai.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan, menurut buku pedoman BPNT dijelaskan bahwa bantuan non tunai disalurkan dalam bentuk uang elektronik maupun bantuan pangan langsung yang berguna mencukupi kebutuhan pokok dalam KPM. Disebutkan tujuan dari BPNT dalam pedoman adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pangan KPM perbulannya.
2. Menjaga nutrisi serta gizi agar seimbang.
3. Meningkatkan sistem penyaluran 6T yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, administrasi, kualitas, dan harga.
4. Memberikan kendali KPM dalam pemenuhan pangan.

Manfaat dari BPNT, diantaranya:

1. Menciptakan perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan efisiensi distribusi bantuan sosial
3. Meningkatkan akses pelayanan perbankan
4. Menciptakan kebiasaan transaksi non tunai
5. Selanjutnya meningkatkan taraf perekonomian daerah.

Dilihat dari kedua manfaat dan tujuan tersebut, maka selain sebagai perlindungan sosial beserta penekanan terhadap pengeluaran kebutuhan pangan, BPNT juga merupakan bantuan yang bertujuan mengajarkan masyarakat terhadap keuangan non tunai di masa modern ini.

Namun baik satu maupun dua bantuan sosial tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan apabila keduanya disalurkan secara bersamaan. Dalam hal PKH penerima manfaat dapat memanfaatkan uang bantuan sebagai penunjang kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Dan apabila dalam pemanfaatan uang tunai tersebut terdapat sisa maka dapat digunakan menjadi usaha sampingan baik itu berdagang atau kegiatan penunjang ekonomi lainnya. Sedangkan dalam bantuan sosial lainnya yaitu BPNT penerima manfaat dapat menggunakan sebagai penunjang gizi keluarga sehari-hari. Dalam penelitian ini, apabila kedua bantuan yang disalurkan dilakukan secara bersamaan maka variabel terikat mengenai penanggulangan kemiskinan juga dapat membangkitkan semangat penerima manfaat dalam memperbaiki taraf ekonomi setelah pandemi covid-19 ini.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Helvin Gultom, 2020 (Kabupaten & Tenggara, 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa BPNT dan PKH secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian didukung peneliti lain oleh Palupi Lindiasari Samputra, Aji Wahyu Ramadhani, 2019) dengan judul "Efektivitas Bantuan Sosial dalam penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non Parametrik" yang mana selain pekerjaan yang dapat mengimbangi kemiskinan, ada salah satu Bantuan sosial yang disebutkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif terhadap jumlah kemiskinan

4. KESIMPULAN

Simpulan

1. Terdapat pengaruh negatif dari adanya BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan di desa Pucangsimo. Karena pada dasarnya bantuan pangan hanya memenuhi kebutuhan pangan dan menekan pengeluaran saja.
2. Terdapat pengaruh positif antara PKH terhadap penanggulangan kemiskinan. Dimana bantuan PKH merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai dapat memenuhi kebutuhan KPM dalam pendidikan anggota keluarga, hingga kesehatan ibu anak serta lansia dan disabilitas.
3. Terdapat pengaruh BPNT dan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan apabila disalurkan secara bersama-sama. Dengan diberikannya kedua bantuan secara bersama dapat memberi pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan.

Saran

1. Bagi masyarakat, untuk menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan keluarga seperti halnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial untuk lansia dan disabilitas. Kemudian bantuan BPNT digunakan untuk pemenuhan gizi dan kebutuhan pangan keluarga dan ada baiknya apabila kedua bantuan lebih dapat dimanfaatkan meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan bagi keluarga penerima

manfaat yang dirasa sudah cukup mandiri untuk meningkatkan perekonomian, untuk segera melakukan graduasi mandiri.

2. Bagi peneliti agar penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang lebih bervariasi dan diduga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap penanggulangan kemiskinan. Agar penelitian selanjutnya lebih variatif alangkah baiknya penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan yang berbeda agar penelitian satu dapat menambah referensi pembaca.

Bagi pemerintahan baik itu pada Dinas Sosial maupun pemerintahan desa Pucangsimo agar selektif dalam memilih calon KPM dengan melihat kondisi langsung dilapangan dengan begitu bantuan yang diterima dapat sesuai sasaran

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugraha, D. (2011). Program penanggulangan kemiskinan. *Kemkoninfo*, 18.
- Hermawan, I., Izzaty, Budiyantri, E., Sari, R., Sudarwati, Y., & Teja, M. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2237>
- Kabupaten, D. I., & Tenggara, M. (2020). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.1 (2020)*. 21(1), 39–53.
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH Di Kecamatan Panggunrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229–241.
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Journal of Rural and Development*, 1(1), 1–9.
- PMK. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174.
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19. *Education and Development*, 9(3), 110–117.
- Sa'adah, L. (2021). *Metode penelitian Ekonomi dan Bisnis*. LPPM Universitas KH A. Hasbullah.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia..* Alfabeta.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.
- PMK. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, 1–174.

- AKMAL, I. A. (2020). IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN SKRIPSI Oleh IMAL ALIMAH AKMAL PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN. *Jurnal Washiyah Volume 1 No 2, 1*.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>